

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KETAPANG DALAM MENANGGULANGI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KETAPANG**

Oleh :

JANUARDI

NIM : E1011171093

Lina Sunyata² , Rasidar²

Email : januardi@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti karena kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan dan menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu bagi manusia, lingkungan serta ekosistem hewan dan tumbuhan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori indikator kinerja dari Dwiyanto (2017:50), yaitu: 1.)Produktivitas, secara produktivitas masih belum maksimal, karena dari target yang ditetapkan belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, selain itu proses pemadaman kebakaran juga masih kurang efektif dan efisien. 2.)Kualitas Layanan, ditinjau dari kualitas layanan bisa dikatakan sudah cukup baik, karena masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan BPBD Kabupaten Ketapang. 3.) Responsivitas, dari sisi responsivitas dapat dikatakan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan daya tanggap yang cukup cepat dari BPBD Kabupaten ketapang saat mendapat laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan disuatu tempat. 4.)Responsibilitas, dari sisi responsibilitas dapat dikatakan masih kurang maksimal, hal ini karena para personil saat melakukan kegiatan pemadaman kebakaran tidak menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) secara maksimal. 5.)Akuntabilitas, dari sisi akuntabilitas sudah cukup baik, hal ini karena BPBD Kabupaten Ketapang melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara adil dan mengutamakan nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat. Peneliti memberikan rekomendasi kepada BPBD Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, membuat fasilitas penampungan air dilokasi yang rawan kebakaran untuk mempermudah pemadaman kebakaran, serta melakukan kegiatan pemadaman kebakaran dengan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) secara maksimal.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi, BPBD, Menanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabupaten Ketapang.

ABSTRACT

The purpose of this research was to describe the performance of the Regional Disaster Management Agency of Ketapang Regency in handling forest and land fires in Ketapang Regency. The problem of forest and land fires was a very interesting problem to study because forest and land fires in Ketapang Regency were increasing and causing many negative impacts for humans, the environment and the ecosystem. In this research, the researcher used qualitative descriptive method with the theory of performance indicators from Dwiyanto (2017: 50), namely: 1.) Productivity, productivity was not maximized, because the target had not gotten the results as expected, in addition to the ineffective and inefficient firefighting. 2.) Service Quality, the service quality was considered quite good because the community was satisfied with the services of the BPBD of Ketapang Regency. 3.) Responsiveness, the responsiveness was quite good which was indicated by the fairly fast response from the BPBD of Ketapang Regency when receiving reports of forest and land fires from a place. 4.) Responsibility, the responsibility was considered suboptimal because the personnel did not carry out the firefighting activities in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure) to the fullest. 5.) Accountability, the accountability was considered quite good because the BPBD of Ketapang Regency carried out forest and land fire management fairly and prioritized human values existing in the community. The researcher recommended the BPBD of Ketapang Regency to improve firefighting facilities and infrastructure, make water storage facilities in fire-prone locations to facilitate firefighting, and carry out firefighting activities by implementing SOPs (Standard Operating Procedures) to the fullest.

Keywords: Organizational Performance, BPBD, Handling Forest and Land Fires, Ketapang Regency.

A. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama saat musim kemarau. Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara tropis yang sangat rentan sekali terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai efek yang merugikan, yaitu merusak ekosistem hutan, menyebabkan kabut asap, mengganggu penerbangan, mengganggu jarak pandang pengendara kendaraan di darat maupun laut serta menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA).

Selain itu, sistem ekonomi dan Pendidikan juga ikut terdampak dengan adanya kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Akibat dari adanya kabut asap, banyak pekerjaan yang terganggu dan banyak sekolah yang diliburkan sehingga sistem pendidikan tidak bisa berjalan normal sesuai kalender pendidikan. Kabut asap dari Kebakaran hutan di Indonesia juga sampai ke beberapa negara tetangga, seperti malaysia, singapura, dan Brunei Darusalam, hal tersebut tentu sangat merugikan dan memberikan citra negatif

untuk Indonesia. Salah satu wilayah yang sering terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang diketahui bahwa Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dan wilayahnya masih banyak terdapat hutan dan lahan gambut. Di wilayah di Kalimantan Barat terdapat beberapa daerah yang sering sekali mengalami bencana Kebakaran Hutan dan lahan, seperti Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Sambas, Sintang, Kapuas hulu, Landak, Sanggau, Sekadau, Bengkayang, Singkawang dan Mempawah.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan munculnya kabut asap yang sangat membahayakan. Kabut asap tersebut tidak hanya berdampak bagi bidang ekonomi, sosial, budaya dan Pendidikan, namun juga berdampak pada Kesehatan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya. Hal tersebut tentu sangat merugikan karena dapat mengganggu berbagai aktivitas. Berdasarkan data yang bersumber dari pengolahan data Lapan oleh BMKG, hotspot atau titik api terbanyak sepanjang bulan Agustus 2019 di Provinsi Kalimantan Barat adalah

Kabupaten Ketapang yaitu 2.126 titik panas. Namun seiring waktu, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang jumlah titik panas (*hot spot*) di Kabupaten Ketapang mencapai 7.752 titik. Kemudian, berdasarkan data luas lahan yang terbakar dari beberapa daerah di Kalimantan Barat yang dihimpun oleh Open Data Kalbar, dapat diketahui bahwa Kabupaten Ketapang merupakan Kabupaten dengan lahan yang paling banyak terbakar di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 dengan total 2.627.45 Hektar.

Dari data di tersebut dapat diketahui bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang masih belum optimal, sehingga menyebabkan banyaknya lahan yang terbakar. Dalam hal menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang merupakan tugas pemerintah daerah dan semua lapis masyarakat, namun lebih khusus tugas penanggulangan bencana kebakaran ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang. Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang terbentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang merupakan Lembaga yang memiliki tugas utama dalam hal menanggulangi bencana yang terjadi, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Kebakaran hutan dan lahan hampir sering terjadi di Kabupaten Ketapang saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena Wilayah Kabupaten Ketapang memiliki ciri lahan gambut dan semak belukar yang cukup luas yaitu mencapai sekitar 1.374.145 ha. Ciri kontur wilayah Kabupaten Ketapang yang terdapat banyak lahan gambut dan semak belukar tersebut, memang rentan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, maraknya pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan dengan cara membakar lahan juga menjadi salah satu sebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Dari rentang tahun 2015 sampai tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

Ketapang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 titik api di Kabupaten Ketapang menyentuh angka 2.410 titik, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 135 titik api, pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 152 titik api kemudian tahun 2018 terdapat 861 titik api, dan pada tahun 2019, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang Kembali meningkat, bahkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu terdapat 7.752 titik api. Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu masalah bagi masyarakat Kabupaten Ketapang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Mengingat dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang selaku lembaga kebencanaan di Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pada penelitian ini berfokus pada kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat memberikan kontribusi atas perkembangan ilmu sesuai dengan program studi yang peneliti tempuh yaitu program Studi Ilmu Administrasi Publik. Kemudian secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Selain itu dari sisi ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi yang bisa digunakan dan dilaksanakan oleh Lembaga terkait. Dan menjadi bahan referensi atau bahan yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Manajemen Kinerja

menurut Surya Dharma (2012, 25) manajemen kinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi

yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja pada hakikatnya adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sinambela dan Sarton Sinambela (dalam Onita Sari Sinaga dkk 2020, 8) menyebutkan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja dibuat karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk mengetahui dan memahami harapan dari suatu kelompok atau individu. Ketika mengerjakan atau melakukan sesuatu sehingga mereka dapat mengarahkan semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkannya.

Selain itu untuk dapat mengetahui kemampuan atau kepastian dalam mencapai standar yang ditentukan seperti tingkat dukungan dari manajemen, proses, sumber daya serta sistem yang tersedia. Kedua alasan tersebut menjadi dasar bahwa manajemen kinerja adalah memberikan pemahaman terkait dengan apa yang akan dicapai, mengembangkan kapasitas seseorang atau kelompok yang bertujuan pada peningkatan kinerja yang bertujuan pada peningkatan kinerja dengan memberikan dorongan serta bimbingan.

2. Indikator Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Kemudian menurut Mahmudi (2015:153) mengatakan bahwa indikator kinerja merupakan sarana atau alat (*means*) untuk mengukur hasil atau aktivitas, kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri. Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan rambu-rambu atau tanda bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi.

Menurut Dwiyanto dkk (2017, 50-51) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi publik, yaitu:

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator

yang penting.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi. Banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik seperti ketidakpuasan masyarakat dalam kualitas layanan yang diterima oleh organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator terhadap kinerja organisasi publik. Informasi mengenai ketidakpuasan terhadap kualitas layanan seringkali diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Karena akses informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, oleh karena itu kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk menilai organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan dalam indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi

publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas juga dapat dipahami sebagai bentuk respon atau daya tanggap dari organisasi terhadap kebutuhan masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan mempresentasikan dengan kepentingan rakyat. Dalam hal ini konsep akuntabilitas publik digunakan untuk melihat sejauhmana kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Nilai dan norma tersebut

diantaranya, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia.

Sedangkan Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2017 : 52) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain :

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.

b. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat

kaitannya dengan konsep ketercukupan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

d. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan public merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa indikator kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan suatu organisasi dengan berdasarkan elemen-elemen indikator. Dari beberapa Indikator kinerja di atas, peneliti menggunakan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto dkk (2017, 50-51). Peneliti menggunakan indikator

kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto dkk dengan alasan karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur serta menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Sugiyono (2016:53) menjelaskan “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”.

Menurut Sudarwan Danim (2002, 41) Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan

keadaan dengan apa adanya, yaitu tanpa ditambah dan dikurangi. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap data yang ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian (Dadang Kuswana 2011, 37).

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering juga disebut metode penelitian alamiah (*naturalistic*) karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Hal ini berarti penelitian yang dilakukan berguna untuk memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni metode dengan berdasarkan data-data atau fakta-fakta dari orang-orang atau para informan yang terjadi dilapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Alasan peneliti mengambil metode kualitatif, karena metode ini lebih relevan dan

fleksibel dalam mengamati kegiatan yang berkaitan dengan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang dan juga beberapa desa yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Alasan utama peneliti memilih Kantor BPBD Kabupaten Ketapang sebagai lokasi penelitian adalah, karena di Kantor BPBD Kabupaten Ketapang merupakan pusat kegiatan atau berbagai program dari BPBD dalam menanggulangi berbagai bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan, selain itu berbagai data tentang BPBD Kabupaten Ketapang juga tersedia disana. Kemudian para pegawai serta personil BPBD Kabupaten Ketapang juga ada di Kantor tersebut, sehingga mudah untuk dilakukan wawancara. Kemudian pada beberapa Desa yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan Peneliti ingin melakukan wawancara terhadap perangkat desa setempat untuk mengetahui bagaimana respon, upaya

serta tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di tempat mereka. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui seberapa puas masyarakat setempat mengenai kinerja dari BPBD Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Waktu penelitian dilaksanakan pada 23 Februari 2021 sampai pada 29 Maret 2021. Pada Januari 2020 peneliti juga telah melakukan pra penelitian di Kantor BPBD Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan beberapa data awal mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi Subjek penelitian ini adalah Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ketapang, Kasi Pencegahan dan Kesiap siagaan BPBD Kabupaten Ketapang, Personil atau anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Ketapang dan Perangkat desa yang desanya sering mengalami kebakaran hutan dan lahan, yaitu Kepala Desa Tempurukan dan Sekretaris Desa Sungai Pelang Kabupaten Ketapang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik yang dilakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan telah ditentukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan responden, yaitu Kasi kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Ketapang, Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Ketapang dan pihak dari Desa yang desanya sering mengalami kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan yang akan dilaksanakan penelitian. Observasi berguna untuk memperoleh data yang

tidak terungkap sebelumnya dari wawancara kepada responden. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Data hasil observasi terdiri dari deskripsi mendalam mengenai, kegiatan program, perilaku para peserta, aksi para staf dan interaksi antar manusia secara luas yang dapat menjadi bagian dari penyusunan suatu program dan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja mereka. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (BPBD) Ketapang, observasi tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai dari BPBD Kabupaten Ketapang dalam hal menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara langsung di lokasi yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, hal tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh para personil BPBD kabupaten Ketapang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui rekaman atau mencatat dokumen baik itu berbentuk tulisan, ataupun gambar. Dokumen dari kutipan-kutipan yang dianalisis, kutipan-kutipan, atau seluruh kalimat dari hasil rekaman, surat menyurat, laporan resmi, dan survey yang menggunakan pertanyaan terbuka.

5. Instrumen Penelitian

Adapun alat (instrument) pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat Teknik wawancara secara mendalam (terbuka) adalah Sebagai berikut: Panduan wawancara, smart phone, kamera dan buku catatan.
- b. Alat teknik observasi adalah sebagai berikut : Panduan observasi, kamera.
- c. Alat dokumentasi adalah sebagai berikut : kamera, *Smart phone*, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Keabsahan Data

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas

data, maka pengumpulan data yang diperoleh di deskripsikan. Pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke atasan, bawahan dan teman atau rekan kerja. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber tersebut (Sugiyono, 2015:274).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang telah dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek melalui observasi dan dokumentasi. Apabila ketiga teknik tersebut terdapat informasi dan data yang berbeda maka perlu dilakukan diskusi dengan sumber data yang bersangkutan.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dukumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibelitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2015 : 247).

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana fenomena permasalahan telah dijelaskan oleh peneliti pada bagian latar belakang permasalahan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang (BPBD) Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang

dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Pada bagian hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan berkenaan dengan bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang (BPBD) dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Untuk selanjutnya hasil penelitian terkait dengan Kinerja BPBD Kabupaten Ketapang akan dikaji lebih mendalam dengan menggunakan indikator teori yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti dan dianalisis oleh peneliti. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori dari Agus Dwiyanto dkk (2017:50), yang merupakan indikator dalam menganalisis dan menilai kinerja atau hasil kerja dari suatu organisasi, adapun indikator kinerja tersebut yaitu, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Pada indikator produktivitas, peneliti melakukan wawancara, observasi serta menganalisis data kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Berikut merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini :

a. Produktivitas

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator yang penting.

Dalam hal ini produktivitas dari BPBD Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dapat dilihat dari seberapa berhasil dan tercapainya harapan atau target yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang dalam hal menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

Dari hasil observasi serta wawancara peneliti di lapangan, didapat bahwa produktivitas BPBD Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan

lahan di Kabupaten Ketapang masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan antara target atau harapan dari BPBD Kabupaten Ketapang mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dengan hasil yang didapatkan belum sepenuhnya terwujud. BPBD Kabupaten Ketapang memiliki target untuk mengurangi jumlah lahan yang terbakar serta mengurangi resiko kabut asap. Dari data yang ada didapati bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang masih terjadi dan tingkat titik api (*Hotspot*)nya masih mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Ketapang, pada tahun 2018 terdapat 861 titik api, kemudian pada tahun meningkat menjadi 2019 7.752 titik api.

Dan berdasarkan data dari Lembaga Satu Data Kalbar 2019, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ketapang yaitu 2.627.45 Hektar. Kemudian pada tahun 2021, berdasarkan data dari Lembaga Satu Data Kalbar kebakaran di Kabupaten Ketapang dari rentang bulan januari sampai dengan bulan february meningkat dari 25 titik api menjadi 176 titik api.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan sebuah indikator yang dapat dijadikan sebagai

ukuran dari kinerja organisasi publik, yaitu mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik Agus Dwiyanto (2006 : 50). Mengenai pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang kepada masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, selain melakukan observasi dan wawancara kepada BPBD Kabupaten Ketapang, peneliti juga lebih melakukan wawancara kepada pihak desa yang disana sering mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Adapun desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan yaitu Desa Tempurukan dan Desa Sungai Pelang. Seringnya desa-desa tersebut mengalami kebakaran hutan dan lahan berarti sering juga mereka mendapatkan pelayanan dari BPBD Kabupaten Ketapang dalam hal menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di desa mereka.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa kualitas layanan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang kepada masyarakat sudah cukup maksimal.

Hal tersebut merupakan berdasarkan pengakuan langsung dari pihak desa mengenai layanan yang mereka terima dan rasakan dari BPBD Kabupaten Ketapang, khususnya dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa (Agus Dwiyanto dkk, 2017:62). Suatu organisasi yang baik dan memiliki kinerja yang baik bisa dinilai dari sisi responsivitasnya, apabila organisasi tersebut memiliki respon atau daya tanggap yang baik, cepat dan tepat terhadap kebutuhan pengguna jasa atau masyarakat maka organisasi tersebut bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik.

Berdasarkan peneliti dilapangan, peneliti mendapati secara langsung bagaimana mereka merespon dan

menanggapi saat ada laporan kebakaran di suatu tempat. Mereka merespon laporan kebakaran dengan cepat, saat ada laporan kebakaran hutan dan lahan maupun bencana lainnya, mereka langsung bergegas untuk bersiap-siap turun ke lokasi kejadian. Selain itu, dari beberapa pihak desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan juga mengakui bahwa mereka mendapatkan respon atau tanggapan yang baik saat melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan.

d. Responsibilitas

Menurut Lenvine dalam Agus Dwiyanto dkk (2017 : 51), responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Dari pendapat Lenvine dapat dipahami bahwa Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi dan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana responsibilitas

BPBD Kabupaten dalam hal menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, apakah proses pemadaman kebakaran dilapangan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian didapati bahwa, BPBD Kabupaten

Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang memiliki suatu kebijakan mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) pada saat melakukan kegiatan pemadaman. BPBD Kabupaten Ketapang memiliki ketentuan tentang teknis pemadaman kebakaran pada lahan mineral dan lahan gambut. Pada lahan mineral teknis pemadaman yaitu dengan cara menyemprotkan air di atas permukaan tanah, kemudian teknis pemadaman pada lahan gambut yaitu dengan cara disemprot ke dalam tanah yang terbakar. Selanjutnya BPBD Kabupaten Ketapang memberikan kebijakan mengenai standar keselamatan kerja bagi para personilnya, yaitu memakai baju (Baju yang dipakai haruslah baju yang bisa melindungi diri personil dari api), Memakai sarung tangan, memakai helm, dan memakai sepatu. Berdasarkan dari observasi peneliti dilapangan, didapati bahwa dari

sisi teknis pemadaman, personil BPBD Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman berdasarkan teknis yang telah ditentukan, yaitu memadamkan lahan mineral dengan cara disiram dipermukaan, sedangkan memadamkan lahan gambut yang terbakar dengan menyemprot kedalam tanah. Namun dari sisi penerapan standar keselamatan kerja, personil BPBD Kabupaten Ketapang masih belum memakai alat standar keselamatan kerja dengan maksimal.

e. Akuntabilitas

Menurut Agus Dwiyanto dkk (2017:51) menjelaskan bahwa konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Nilai dan norma tersebut diantaranya, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan mengenai akuntabilitas menurut Agus

Dwiyanto dkk di atas, dapat dipahami bahwa tingkat akuntabilitas suatu organisasi dapat diketahui dengan melihat apakah pelayanan yang diberikan oleh organisasi tersebut telah sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat, yang diantaranya adalah prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

1. Prinsip Keadilan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapati bahwa BPBD Kabupaten telah berupaya dengan maksimal untuk memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat, khususnya dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Dengan kondisi wilayah Kabupaten Ketapang yang luas, dan dengan potensi kebakaran hutan yang tinggi, BPBD Kabupaten Ketapang membagi personil mereka menjadi tiga regu (3 regu). Pembagian regu tersebut bertujuan agar BPBD Kabupaten Ketapang bisa melakukan pemadaman di beberapa tempat secara adil.

2. Hak Asasi Manusia

Dari sisi kemanusiaan, BPBD Kabupaten Ketapang melakukan berbagai kegiatan, yaitu memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan saat musim kemarau, serta memberikan bantuan

masker untuk melindungi masyarakat dari efek kabut asap. Selain itu personil BPBD Kabupaten Ketapang juga melakukan patroli rutin untuk memantau daerah bekas kebakaran serta wilayah yang rawan terbakar, hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab BPBD Kabupaten Ketapang untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan Produktivitas

Dari hasil penelitian dan dari data-data yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa produktivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang masih belum maksimal. hal tersebut dikarenakan antara target atau harapan dari BPBD Kabupaten Ketapang mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dengan hasil yang didapatkan belum sepenuhnya terwujud, karena kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang masih terjadi dan tingkat titik api (*Hotspot*)nya masih mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Namun walaupun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten (BPBD) Ketapang telah berusaha secara maksimal agar target mereka yaitu kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang bisa teratasi dan tidak terjadi lagi ditahun-tahun yang akan datang.

Kualitas Layanan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa perangkat desa yang desanya sering mengalami kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, yaitu Desa Tempurukan dan Desa Sungai Pelang.

Sebagai pihak yang sering mendapatkan pelayanan dari BPBD Kabupaten Ketapang khususnya dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di, mereka merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Ketapang kepada desa mereka. Selain itu, dari hasil observasi peneliti juga didapati bahwa BPBD Kabupaten Ketapang melakukan pelayanan 24 Jam sebagai upaya

memaksimalkan kualitas pelayanan mereka.

Responsivitas

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa responsivitas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang sudah cukup baik.

Hal tersebut berdasarkan dari observasi atau pengamatan langsung peneliti di lapangan. Saat mendapatkan laporan adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan, personil dari BPBD Kabupaten Ketapang bergerak cepat untuk mempersiapkan alat pemadaman dan segera berangkat menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan. selain itu, dari pihak desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan juga mengakui bahwa respon dari BPBD Kabupaten Ketapang saat ada laporan kebakaran sudah cukup baik.

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan tingkat kesesuaian pelaksanaa suatu kegiatan organisasi dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Mengenai hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa

responsibilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang masih kurang maksimal, karena terdapat personil BPBD Kabupaten Ketapang yang saat melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran tidak secara maksimal mengikuti arahan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Ketapang. Hal tersebut berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada kasi Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Ketapang dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Ketapang memiliki kebijakan dalam penanggulanngan kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada proses pemadaman kebakaran. Kebijakan tersebut meliputi teknis pemadaman dan standar keselamatan kerja para personil.

Dari segi teknis pemadaman, peneliti mendapati bahwa personil telah melakukan pemadaman kebakaran sesuai dengan teknis yang telah diarahkan dan ditetapkan oleh BPBD Kab upaten Ketapang. Namun dari segi standar keselamatan kerja, banyak dari personil BPBD Kabupaten Ketapang yang tidak menjalankan standar keselamatan kerja sesuai kebijakan dari BPBD Kabupaten Ketapang itu sendiri.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Nilai dan norma tersebut diantaranya, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang sudah cukup baik.

Hal tersebut berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, didapati bahwa dari sisi keadilan, BPBD Kabupaten Ketapang telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang adil dalam hal menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Ketapang membagi personil mereka menjadi beberapa regu yang dimaksudkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di beberapa tempat berbeda namun dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Selanjutnya dari sisi kemanusiaan atau prinsip Hak Asasi Manusia, BPBD Kabupaten Ketapang

juga telah melakukan berbagai upaya dalam hal menolong masyarakat menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. BPBD Kabupaten Ketapang menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Desa yang membutuhkan, sebagai wujud kepedulian BPBD Kabupaten Ketapang terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat saat musim kemarau. selain itu mereka juga membagikan bantuan masker kepada masyarakat sebagai upaya menjaga Kesehatan masyarakat dari dampak buruk kabut asap hasil dari kebakaran hutan dan lahan.

2. Saran

Pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang diharapkan agar membuat fasilitas penampungan air yang berfungsi untuk menyimpan air di lokasi rawan kebakaran. Hal tersebut dimaksudkan agar saat terjadi kebakaran dimusim kemarau dan tidak terdapat air di sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Masih bisa melakukan pemadaman dengan menggunakan fasilitas penyimpanan air tersebut. *Kedua*, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang

diharapkan untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasana penanggulangan kebakaran. *Ketiga*, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang agar meningkatkan jumlah sarana keselamatan kerja untuk para personil.

Keempat, Para personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang diharapkan lebih mematuhi standar keselamatan kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ketapang secara maksimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

Bintoro dan Daryanto 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media

Danim Sudarwan 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Dharma Surya 2012. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dwiyanto Agus dkk 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers

Hayat 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers

Keban, YT. 2014. *Enam Dimensi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Kuswana Dadang 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : CV. Pustaka Setia

Mahsun Mohamad 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

Mahmudi 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mukarom, Zaenal dan Laksana M.W 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia

Sedarmayanti 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sinaga Onita Sari dkk 2020. *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis

Sugiyono 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

_____ 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

_____ 2010. *Memahami Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

_____ 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____ 2015. *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wibowo 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

_____ 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang.

Open Data Kalbar.2019. “Laporan Harian Penanggulangan Darurat Bencana” Di unduh pada 23 November 2020:
<http://data.kalbarprov.go.id/dataset/laporan-harian-penanganan-darurat>

RUJUKAN ELEKTRONIK

BPS Kabupaten Ketapang. 2019. “Ketapang Dalam Angka 2019.” Diakses Pada Senin 23 November 2020,
<https://ketapangkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/518373eb3a547276f2244f12/kabupaten-ketapang-dalam-angka-2019.html>.

Pemprov Kalbar. “*Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat*”.Diakes Pada Sabtu 28 November 2020.
<https://kalbarprov.go.id/page/geografis#:~:text=Secara%20umum%20C%20daratan%20Kalimantan%20Barat,bercampur%20gambut%20dan%20hutan%20mangrove>.

KA. Wibowo 2019. *Manajemen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan*. Di akses pada
<http://Jurnal.Radenfatah.ac.id>. Pada 17 Maret 2020 Pukul 11.10 wib.

Mufidhatul Izmy 2016. *Penanggulangan Hutan dan Lahan dalam Perspektif HumanSecurity*. Diakses pada
<https://core.ac.uk/download/pdf/77626823.pdf>. Pada 17 Maret Pukul 11.19 wib.